PARABELA

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume X Edisi X, Maret 2021 (1-11)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
Nomor DOI: https://doi.org/10.51454/9rfc4f97

Partisipasi sehari-hari dan perlindungan prosedural dalam pemilihan lingkungan di Padaleu Indonesia

Muhammad Nasir[1*]

[1,] Fakultas iIlmu sosial dan ilmu politik, universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia*

*Email korespondensi: muhammadnasir_fisip@uho.ac.id

Abstract

Neighbourhood elections show how residents and local officials organise political participation through institutions. This qualitative study examines Rukun Tetangga and Rukun Warga leadership selection in Padaleu, Kendari, Indonesia. The analysis draws on five role-labelled interview summaries and observations from a field record. Thematic analysis examined procedures, candidates, contributions, and documentation. Findings indicate deliberative committee formation, exclusion of committee members from candidacy, administrative coordination through the kelurahan office, and announcements through mosques and WhatsApp groups. Candidates emphasised service and resident encouragement; one RW candidate reported spending IDR 600,000 on a campaign banner. Observations recorded food and financial contributions, venues, unpaid counting witnesses, and smartphone photography during voting. These accounts suggest that election implementation combined administrative coordination with residents' resources and social networks, but do not establish fairness, inclusion, or effects on trust. The study proposes clearer funding records, accessible announcements, defined witness roles, and privacy-conscious documentation as safeguards requiring further research.

Keywords*: neighbourhood governance; community participation; electoral administration; coproduction; informal institutions; Indonesia*

Abstrak

Pemilihan lingkungan menunjukkan bagaimana warga mengatur partisipasi politik melalui institusi sehari-hari. Studi kualitatif ini menganalisis pemilihan ketua RT dan RW di Padaleu, Kendari, Indonesia. Data berasal dari lima ringkasan wawancara dan pengamatan pemilihan. Analisis tematik mencakup prosedur, calon, kontribusi, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan pembentukan panitia deliberatif, larangan anggota panitia mencalonkan diri, serta koordinasi melalui kantor kelurahan secara lebih transparan. Pengumuman disebarkan melalui masjid dan WhatsApp. Calon menekankan pelayanan masyarakat; seorang calon RW melaporkan pengeluaran IDR 600.000 untuk spanduk. Pengamatan mencatat kontribusi makanan dan keuangan, saksi penghitungan tanpa bayaran, serta dokumentasi telepon pintar. Temuan menunjukkan perpaduan koordinasi administratif, sumber daya warga, dan jejaring sosial, tetapi belum membuktikan keadilan atau inklusi. Penelitian merekomendasikan pencatatan dana, peran saksi yang jelas, dan perlindungan privasi.

Kata kunci*: tata kelola lingkungan; partisipasi komunitas; administrasi pemilihan; koproduksi; institusi informal; Indonesia*

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume X Edisi X, Maret 2021 (1-11)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
Nomor DOI: https://doi.org/10.51454/9rfc4f97

1. Pendahuluan

Demokrasi lokal sebagian bergantung pada
pengaturan di mana penduduk memilih perwakilan yang dekat dengan kepentingan sehari-hari mereka. Di Indonesia, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) menyediakan lingkungan di mana organisasi komunitas bersinggungan dengan administrasi publik. Pemilihan kepemimpinan mereka layak mendapat perhatian lebih dari sekadar pertanyaan siapa yang menang. Membentuk komite, mengkomunikasikan prosedur pencalonan, menyiapkan materi pemungutan suara, dan mengatur observasi semuanya memerlukan koordinasi praktis. Penelitian terbaru tentang asosiasi lingkungan mengaitkan keterlibatan penduduk

dengan aksi kolektif dan pemberdayaan komunitas (Orbawati et al., 2026). Kemungkinan seperti ini membuat pemilihan relevan secara analitis, tetapi partisipasi dalam mengorganisir acara tidak dapat hanya menunjukkan bahwa semua penduduk memiliki pengaruh politik yang sama. Penelitian tentang tata kelola lokal Indonesia memperingatkan agar tidak menganggap institusi terdesentralisasi menghasilkan praktik demokrasi yang seragam. Aspinall et al. (2025) mengidentifikasi variasi substansial dalam tata kelola desa, termasuk pemilihan dan pengaturan akuntabilitas. Syukri (2024) mempertanyakan kemampuan tata kelola desa partisipatif untuk mengatasi kemiskinan dan marginalitas di bawah kondisi politik yang berlaku. Studi-studi ini berkaitan dengan institusi desa, bukan pemilihan RT/RW perkotaan, sehingga temuan mereka tidak bisa begitu saja dialihkan ke Padaleu. Namun demikian, mereka mengidentifikasi pertanyaan yang berguna: bagaimana pengaturan formal berinteraksi dengan hubungan sosial yang sebenarnya memungkinkan partisipasi terjadi? Memeriksa pekerjaan pemilihan lingkungan dapat mengungkap interaksi ini dalam skala organisasi yang lebih kecil.

Dua perbedaan konseptual membimbing penyelidikan. Pertama, partisipasi bervariasi dalam otoritas yang diberikan kepada warga, bukan hanya pada jumlah aktivitas yang mereka lakukan (Arnstein, 1969; Fung, 2006). Menyediakan hidangan minuman, berdiri sebagai kandidat, dan mengamati penghitungan melibatkan hubungan yang berbeda dengan pengambilan keputusan. Kedua, kegiatan publik dapat diproduksi bersama melalui kontribusi dari organisasi publik dan penduduk (Ostrom, 1996). Penelitian membedakan bentuk dan tahapan kontribusi tersebut daripada memperlakukan semua kerja sama sebagai setara (Brandsen & Honingh, 2016; Nabatchi et al., 2017). Perbedaan ini membantu memeriksa siapa yang menyediakan sumber daya untuk pemilihan dan apa yang dapat ditentukan oleh kontribusi tersebut tentang agensi politik.

Kajian Indonesia juga menunjukkan mengapa solidaritas komunitas memerlukan interpretasi yang cermat. Bowen (1986) meneliti konstruksi politik gotong royong, sementara karya historis tentang kewarganegaraan sosial menempatkan bantuan timbal balik dalam hubungan yang berubah antara warga dan negara (Suwignyo, 2019). Kerja komunitas dapat mengekspresikan rasa memiliki, namun maknanya bergantung pada harapan dan otoritas. Demikian pula, jaringan elektoral dapat mengoordinasikan aksi kolektif atau mendukung pertukaran material. Penelitian tentang perantara dan

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume X Edisi X, Maret 2021 (1-11)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
Nomor DOI: https://doi.org/10.51454/9rfc4f97

pembelian suara menunjukkan perlunya menyelidiki hubungan dan kondisi daripada menyimpulkan motivasi hanya dari keberadaan jaringan (Aspinall, 2014; Hicken, 2011).

Kehati-hatian yang sama berlaku ketika penduduk dan kandidat menyumbangkan sumber daya untuk pemilihan lingkungan.

Studi ini menanyakan bagaimana prosedur administratif, jaringan komunitas, dan kontribusi penduduk muncul dalam catatan lapangan singkat seleksi RT/RW di Kelurahan Padaleu. Studi ini juga menanyakan pertanyaan prosedural apa yang muncul dari pengaturan yang direkam. Tujuannya adalah mengembangkan penjelasan eksploratif tentang organisasi pemilihan sambil mengidentifikasi batasan bukti. Artikel ini memberikan pembedaan antara pekerjaan kolektif yang memungkinkan pemilihan dan perlindungan yang diperlukan untuk menilai kualitas demokratisnya. Artikel ini tidak menguji hipotesis kausal maupun memperkirakan tingkat partisipasi. Analisis berlanjut dari praktik yang dilaporkan hingga interpretasi terbatas dan pertanyaan praktis untuk penyelidikan yang lebih lengkap.

2. Metode Penelitian

Kasus ini berkaitan dengan pemilihan kepemimpinan RT/RW di Kelurahan Padaleu, Kendari, Sulawesi Tenggara. Catatan lapangan mengidentifikasi kelurahan tetapi tidak menyebutkan tanggal pemilihan, jumlah unit lingkungan yang terlibat, atau daftar pemilih. Ringkasan lurah merujuk pada Peraturan Walikota Kendari No. 55 tahun 2021. Repositori hukum resmi secara independen mengidentifikasi peraturan tersebut sebagai terkait RW dan RT (Wali Kota Kendari, 2021). Verifikasi ini menetapkan identitas instrumen yang dikutip; tidak menunjukkan bahwa setiap praktik yang tercatat mematuhi setiap ketentuan atau mengidentifikasi aturan yang berlaku pada tanggal pemilihan tanpa dokumen.

Desainnya adalah analisis kualitatif eksploratif dari ringkasan wawancara dan catatan observasi yang sudah ada. Unit analisis adalah catatan atau praktik yang tercatat dalam kasus lokal ini, bukan pemilih, populasi lingkungan, atau hasil pemilu. Analisis dokumenter membutuhkan perhatian pada bagaimana sebuah catatan dibuat dan apa yang dihilangkannya (Bowen, 2009). Oleh karena itu, catatan tersebut diperlakukan sebagai catatan selektif tentang organisasi pemilihan. Mereka tidak dapat mendukung analisis survei representatif, audit kepatuhan hukum, atau deskripsi etnografi kehidupan sehari-hari dalam jangka waktu yang lama.

Bukti dan asal-usul

Korpus dokumenter ini berisi lima ringkasan wawancara berlabel peran: lurah, ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ketua komite pemilihan, kandidat RW, dan kandidat RT. Ini adalah lima posisi yang tercatat, bukan ukuran sampel peserta yang

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume X Edisi X, Maret 2021 (1-11)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
Nomor DOI: https://doi.org/10.51454/9rfc4f97

terverifikasi: catatan tidak menyediakan identifikasi peserta atau menunjukkan apakah peran saling tumpang tindih. Bagian observasi tambahan menjelaskan kontribusi, tempat pemungutan suara, saksi, dan fotografi. Tidak ada transkrip lengkap maupun pertanyaan wawancara, rekaman, formulir persetujuan, catatan sampel, atau tanggal observasi yang

menyertai catatan tersebut. Tidak ada identitas penulis, afiliasi, pernyataan pendanaan, atau detail persetujuan etika yang dilaporkan dalam sumber.

Analisis ini mempertahankan label peran karena membedakan perspektif administratif dan kandidat, tetapi tidak menambahkan pengenal pribadi. Semua laporan wawancara disajikan sebagai parafrase, bukan sebagai kesaksian verbatim. Kata-kata bahasa Inggris menerjemahkan makna ringkasan bahasa Indonesia tanpa merekonstruksi dialog yang tidak tercatat. Pengeluaran banner dipertahankan sebesar IDR 600.000, mencakup produksi dan pemasangan seperti yang dinyatakan. Tidak ada penyesuaian untuk inflasi, konversi mata uang, keterjangkauan rumah tangga, total pengeluaran kampanye, atau biaya pemilu secara keseluruhan karena informasi kontekstual yang relevan tidak ada.

Prosedur analitis

Catatan lengkap dibaca untuk membedakan ringkasan wawancara dari pengamatan. Pengkodean deskriptif kemudian mengidentifikasi pembentukan komite, pemisahan kelayakan, persiapan administratif, saluran komunikasi, akun pencalonan, kontribusi moneter dan barang, pengaturan tempat, saksi, dan dokumentasi visual. Kode terkait diorganisasikan dalam lima tema analitis. Pendekatan ini menggunakan analisis tematik sebagai organisasi interpretatif materi kualitatif (Braun & Clarke, 2006; Byrne, 2022). Pendekatan ini menggunakan tema eksplisit tanpa mengklaim kedalaman atau keterlibatan iteratif yang terkait dengan studi tematik refleksif berbasis wawancara penuh. Braun dan Clarke (2023) memperingatkan agar tidak menyajikan prosedur tematik tanpa menjelaskan asumsi analitis mereka.

Setiap interpretasi diperiksa terhadap bagian sumber yang bersangkutan. Pernyataan tentang prosedur dikaitkan dengan peran yang relevan; kontribusi yang diamati dijaga agar terpisah dari penjelasan mengapa orang berkontribusi. Keheningan tidak dikodekan sebagai ketidakhadiran: misalnya, mekanisme keluhan yang tidak disebutkan diklasifikasikan sebagai tidak terdokumentasi, bukan tidak ada. Tidak ada hitungan frekuensi, statistik keandalan antar-pengkode, klaim saturasi, atau uji kausal yang dihasilkan. Peran literatur bersifat interpretatif: temuan yang dipublikasikan mengontekstualisasikan praktik yang tercatat tetapi tidak menyediakan bukti lokal yang hilang.

Batasan kualitas dan etika

Prinsip pelaporan dari COREQ dan Standards for Reporting Qualitative Research menginformasikan identifikasi informasi metodologis yang hilang (Tong et al., 2007;

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume X Edisi X, Maret 2021 (1-11)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
Nomor DOI: https://doi.org/10.51454/9rfc4f97

O'Brien et al., 2014). Penggunaannya tidak berarti bahwa pengumpulan data asli memenuhi standar tersebut. Kekuatan informasi bergantung pada relevansi dan kedalaman materi, bukan sekadar pada jumlah wawancara nominal (Malterud et al., 2016), sementara pemilihan kasus memerlukan tujuan inferensi eksplisit (Small, 2009). Di sini, korpus sempit mendukung deskripsi awal dan pertanyaan untuk penelitian lebih lanjut. Transparansi dan koherensi diprioritaskan dibandingkan klaim cakupan komprehensif, konsisten dengan kriteria kualitas kualitatif yang dibahas oleh Tracy (2010).

Tidak ada klaim bahwa persetujuan etis atau persetujuan yang diinformasikan telah diperoleh. Catatan yang tersedia tidak mendokumentasikan keduanya. Deskripsi peran mungkin masih memungkinkan pengakuan dalam komunitas kecil, dan penggunaan foto asli atau kesaksian yang lebih lengkap selanjutnya memerlukan perhatian pada persetujuan dan identifikasi. Analisis ini tidak mereproduksi gambar dan mengaitkan dugaan pelanggaran terhadap individu. Pembahasan tentang pendanaan, nominasi, dan fotografi mengidentifikasi kemungkinan masalah prosedural, bukan temuan paksaan, korupsi, atau pelanggaran privasi.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 ***Pembentukan komite musyawarah dan pemisahan dari pencalonan***

Catatan lurah menyajikan pemilihan secara bersamaan dan menyatakan bahwa komite pemilihan harus dibentuk di setiap RT. Pembentukan komite digambarkan berlangsung melalui musyawarah dalam sebuah pertemuan. Ringkasan yang sama menyatakan bahwa anggota komite tidak dapat mencalonkan diri mereka sendiri untuk kepemimpinan RT atau RW. Ini memberikan bukti adanya pemisahan yang jelas antara administrasi pemilihan dan pencalonan. Laporan ini tidak menunjukkan komposisi komite individual, pelaksanaan pertemuan mereka, atau apakah aturan keanggotaan diterapkan secara konsisten di seluruh unit.

Ringkasan ketua komite menjelaskan urutan yang dimulai dengan mempublikasikan pendaftaran kandidat, melaporkan daftar kandidat ke kantor Kelurahan, dan melanjutkan ke jangkauan kandidat serta pengambilan nomor kandidat. Satu frasa dalam ringkasan tersebut secara tata bahasa tidak lengkap. Oleh karena itu, analisis mempertahankan aktivitas yang disebutkan tanpa menetapkan durasi yang tidak tercatat atau merekonstruksi siapa yang mengizinkan setiap langkah. Secara bersama-sama, akun administratif menunjukkan urutan organisasi yang dimaksudkan. Mereka tidak menyediakan formulir nominasi, keputusan komite, kehadiran rapat, atau jadwal lengkap yang dapat digunakan untuk mengaudit urutan tersebut secara independen.

3.2 Koordinasi dan komunikasi terpusat melalui jaringan yang sudah ada

Ketua LPM melaporkan bahwa persiapan administratif terpusat di kantor kelurahan, termasuk surat suara, kotak suara, dan beberapa spanduk. Akun yang sama mengidentifikasi pengumuman melalui masjid dan grup WhatsApp yang terkait dengan RT, RW, Dasa Wisma, dan manajemen masjid. Catatan tersebut dengan demikian

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume X Edisi X, Maret 2021 (1-11)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
Nomor DOI: https://doi.org/10.51454/9rfc4f97

menggambarkan komunikasi melalui beberapa saluran komunitas yang sudah mapan bersamaan dengan koordinasi oleh kantor publik. Catatan tersebut tidak merinci apakah semua saluran membawa informasi yang sama, apakah pengumuman diulang, atau bagaimana penduduk di luar jaringan ini menerima pemberitahuan.
Sumber hanya membedakan materi administratif dari aktivitas kandidat secara sebagian. Beberapa spanduk muncul dalam akun persiapan LPM, sedangkan spanduk lain digambarkan sebagai pengeluaran milik kandidat sendiri. Hal-hal ini tidak boleh digabungkan ke dalam satu kategori pendanaan. Demikian pula, keberadaan beberapa saluran komunikasi merupakan bukti pengaturan jangkauan, bukan bukti ukuran audiens. Tidak ada arsip pesan, daftar kehadiran, wawancara penghuni tentang akses informasi, atau data tentang kesadaran pendaftaran. Sejauh mana komunikasi menjangkau berbagai kelompok masih belum diketahui.

3.3 Pencalonan sebagai layanan dan dorongan dari penduduk

Kandidat RW menggambarkan pencalonan jabatan untuk melayani penduduk. Calon menyiapkan spanduk dengan slogan Bertaqwa, yang dikembangkan melalui aspirasi termasuk kebersihan, lingkungan yang menarik, komitmen agama, kualitas, pertimbangan, dan kontinuitas. Biaya produksi dan pemasangan spanduk yang dilaporkan adalah IDR 600.000. Ini adalah satu-satunya jumlah uang dalam catatan lapangan. Ini mewakili satu pengeluaran yang dinyatakan oleh satu akun kandidat berlabel peran, bukan anggaran kampanye, rata-rata pengeluaran, atau ukuran sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk mencalonkan diri dalam posisi RW.

Kandidat RT memberikan penjelasan pendaftaran yang berbeda, menggambarkan dorongan dari banyak penduduk untuk mendaftar. Ini menunjukkan bagaimana kandidat tersebut menjadi dasar pencalonan. Ringkasan tersebut tidak mengidentifikasi penduduk yang bersangkutan atau memberikan konfirmasi independen atas preferensi mereka. Tidak ada catatan kandidat yang menetapkan pentingnya ambisi pribadi, pelayanan publik, harapan sosial, atau motif lainnya. Catatan juga tidak melaporkan hasil pemilu mereka pada akhirnya. Kedua ringkasan tersebut mendokumentasikan narasi pencalonan dan presentasi publik, bukan penjelasan komparatif tentang keberhasilan kandidat.

3.4 Kontribusi kolektif dan organisasi material pemungutan suara

Bagian pengamatan mencatat kontribusi keuangan penduduk bersama kontribusi dari kandidat yang bersaing. Penduduk juga membawa camilan, termasuk berbagai kue. Pemimpin RT dan RW yang dipilih melalui aklamasi digambarkan membawa makanan ke tempat pemungutan suara. Dukungan pemilihan dengan demikian melampaui persaingan kandidat dalam contoh yang tercatat. Catatan tidak menyatakan jumlah yang dikumpulkan, jumlah kontributor, siapa yang meminta kontribusi, atau apakah kontributor dapat menolak tanpa konsekuensi sosial. Tidak ada buku besar keuangan atau informasi tentang bagian biaya yang ditanggung oleh sumber daya publik.
Lokasi pemungutan suara yang tercatat meliputi rumah penduduk, aula kelurahan, gedung olahraga, dan area di samping atau sekitar masjid. Contoh-contoh ini menunjukkan penggunaan ruang yang ada; mereka tidak menetapkan jumlah tempat

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume X Edisi X, Maret 2021 (1-11)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
Nomor DOI: https://doi.org/10.51454/9rfc4f97

pemungutan suara atau distribusinya. Saksi yang menghitung digambarkan sebagai sukarelawan tanpa bayaran. Tabel 1 menggabungkan pengamatan ini sambil membedakan apa yang dapat ditetapkan masing-masing. Catatan tidak memuat daftar saksi, deskripsi akreditasi, penilaian aksesibilitas, atau observasi sistematis penghitungan. Oleh karena itu, penyediaan kolektif terlihat, tetapi distribusi dan konsekuensi proseduralnya tidak dapat diukur.

Tabel 1 Sumber daya pemilihan yang tercatat dan batasan interpretasi

Sumber daya atau praktik yang direkam	**Bukti dalam catatan lapangan**	**Apa yang masih belum diketahui**
Kontribusi keuangan	Penduduk dan kandidat yang bersaing berkontribusi pada organisasi.	Jumlah, syarat, pengaturan penagihan, dan bagian pendanaan publik.
Kontribusi makanan	Penduduk dan pemimpin yang dipilih melalui aklamasi membawa kue atau camilan.	Jumlah kontributor, nilai, kesukarelaan, dan beban rumah tangga.
Tempat pemungutan suara	Rumah, aula kelurahan (aula kelurahan) gedung olahraga, dan area di samping atau sekitar masjid.	Jumlah dan distribusi stasiun, aksesibilitas, serta pengaturan privasi.
Menghitung saksi	Saksi digambarkan sebagai relawan tanpa bayaran.	Seleksi, afiliasi, pelatihan, hak pengamatan, dan keberatan yang tercatat.
Publisitas kandidat	Satu kandidat RW melaporkan IDR 600.000 untuk produksi dan pemasangan banner.	Total pengeluaran kampanye, sumber pendanaan, biaya perbandingan, dan efek elektoral.
Dokumentasi smartphone	Beberapa anggota komite memotret penduduk saat pemungutan suara sebagai bukti potensial.	Konten gambar, persetujuan, akses, retensi, dan setiap eksposur pilihan suara.

Catatan. Entri merangkum catatan wawancara dan observasi. Kontribusi tidak diukur lebih dari pengeluaran yang dilaporkan kandidat tunggal.

3.5 Fotografi sebagai bukti yang diantisipasi untuk keberatan

Catatan pengamatan menyatakan bahwa beberapa anggota komite memotret warga saat pemungutan suara menggunakan ponsel, dengan tujuan yang dinyatakan untuk menyimpan bukti jika kandidat keberatan. Catatan tersebut mengaitkan dokumentasi dengan perkiraan kontestasi yang diperkirakan. Catatan ini tidak merinci apakah gambar menunjukkan kehadiran, distribusi surat suara, tindakan menandai surat suara, atau surat suara yang ditandai itu sendiri. Catatan juga tidak mengidentifikasi siapa yang

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume X Edisi X, Maret 2021 (1-11)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
Nomor DOI: https://doi.org/10.51454/9rfc4f97

menyimpan berkas, apakah penduduk menyetujui, atau apakah gambar kemudian digunakan dalam pengaduan.

Ambiguitas ini penting dalam deskripsi temuan. Bukti hanya mendukung keberadaan beberapa dokumentasi fotografi dan alasan yang tercatat. Bukti ini tidak mendukung temuan bahwa pilihan suara terungkap, bahwa fotografi mencegah pelanggaran, atau bahwa itu menyelesaikan perselisihan. Tidak ada keluhan, keputusan penilaian, atau perbandingan prosedur yang difoto dan tidak difoto yang disertakan. Dokumentasi muncul sebagai tindakan pencegahan informal dalam pekerjaan pemilihan yang diamati; efektivitas dan implikasi privasinya tetap menjadi pertanyaan untuk penyelidikan lebih lanjut.

Diskusi

3.1 Koordinasi administratif dan kontribusi komunitas

Temuan utama adalah bahwa organisasi pemilihan yang tercatat menggabungkan pusat administrasi publik dengan kontribusi yang tersebar melalui hubungan komunitas. Pembentukan komite, pelaporan nominasi, dan persiapan materi dijelaskan bersamaan dengan penyediaan makanan, penggunaan tempat, dan kesaksian tanpa bayaran. Kombinasi ini konsisten dengan perspektif koproduksi, yang memperlakukan aktivitas publik bergantung pada kontribusi dari berbagai aktor daripada hanya pada penyediaan pemerintah (Bovaird, 2007). Perbandingan tetap analitis: pemilihan melibatkan otoritas dan representasi, sehingga tidak boleh diperlakukan saling bergantian dengan lingkungan layanan tempat banyak penelitian koproduksi berkembang.

Perbedaan menjadi lebih jelas ketika pemilihan dipertimbangkan melalui pertanyaan siapa yang berpartisipasi, apa yang mereka kontribusikan, dan pada tahap mana. Steiner et al. (2023) mengusulkan untuk menelaah dimensi-dimensi tersebut secara sistematis. Dalam Padaleu, pejabat dan penyelenggara muncul dalam persiapan prosedural, kandidat dalam nominasi dan kampanye, serta residen dalam penyediaan sumber daya dan saksi. Posisi-posisi ini mungkin tumpang tindih, tetapi sumber tidak dapat memetakan tumpang tindih tersebut. Implikasi yang berguna adalah mendokumentasikan kontribusi secara terpisah daripada menggunakan satu label partisipasi yang luas. Seorang residen yang memasok makanan dan seorang anggota komite yang memutuskan bagaimana keluhan dicatat melakukan berbagai aktivitas dengan otoritas yang berbeda.

Interaksi kelembagaan memberikan interpretasi kedua. Helmke dan Levitsky (2004) menjelaskan mengapa institusi informal perlu dianalisis dalam kaitannya dengan aturan formal. Catatan Padaleu menunjukkan koordinasi resmi yang berjalan melalui pertemuan, kelompok komunitas, dan tempat yang tersedia secara lokal. Mereka tidak menunjukkan bahwa praktik-praktik ini bertentangan dengan regulasi. Mereka menyarankan bahwa pemeriksaan prosedur formal saja akan mengabaikan banyak pekerjaan implementasi. Penelitian desa Indonesia terbaru juga mengarahkan perhatian pada variasi bagaimana aturan dan hubungan beroperasi bersama (Aspinall et al., 2025),

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume X Edisi X, Maret 2021 (1-11)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
Nomor DOI: https://doi.org/10.51454/9rfc4f97

meskipun kasus lingkungan ini tidak dapat membuktikan apakah pola tata kelola yang sama terjadi di berbagai tingkat institusi.

3.2 Partisipasi dan distribusi pengaruh

Kontribusi yang diamati menetapkan aktivitas tetapi meninggalkan inklusi yang belum terselesaikan. Kontribusi tersebut tidak memberikan indikator partisipasi pemilih, tidak ada profil demografis relawan, dan tidak ada catatan siapa yang berbicara selama pembentukan komite. Perbedaan interpretatif adalah antara berpartisipasi dalam pelaksanaan dan memengaruhi keputusan. Pekerjaan pada taman lingkungan di Surakarta menunjukkan bagaimana aksi lokal dapat bergantung pada pengakuan oleh asosiasi lingkungan (Fajri & Pradoto, 2023). Hubungan tersebut mendorong pemeriksaan akses dan pengakuan dalam Padaleu, tetapi tidak menunjukkan pengecualian di sini. Pemilihan inklusif akan membutuhkan bukti tentang pengalaman penduduk di luar penyelenggara dan kandidat.

Penelitian tentang partisipasi juga memperingatkan agar tidak menyamakan forum yang tersedia dengan pengaruh yang setara. Evans dan Fernandez-Burgos (2023) membedakan kekuatan komunitas dari pemahaman pemberdayaan yang lebih sempit, sementara pekerjaan tingkat desa oleh Sidik dan Habibi (2024) meneliti bagaimana pengaturan partisipatif dapat hidup berdampingan dengan akses sumber daya yang tidak setara. Kedua temuan tersebut tidak menetapkan penangkapan elit dalam Padaleu. Sebaliknya, perspektif ini mencantumkan pengamatan yang hilang: siapa yang dapat menunjukkan, siapa yang dapat menantang keputusan, dan apakah penduduk yang lebih miskin atau kurang terhubung dapat berpartisipasi dengan syarat yang sebanding. Ketiadaan penjelasan ini mempersempit kesimpulan artikel hanya pada organisasi yang tercatat hanya dalam kumpulan ringkasan peran yang kecil.

Kontribusi sumber daya dapat menimbulkan beban yang tidak setara meskipun digambarkan sebagai sukarela. Jakobsen dan Andersen (2013) menunjukkan pentingnya kesetaraan dalam koproduksi, sementara penelitian eksperimental menunjukkan bahwa inisiatif publik dapat memengaruhi kontribusi warga negara (Jakobsen, 2013). Padaleu tidak memberikan dasar untuk mengukur hubungan tersebut. Kontribusi finansial, makanan, dan waktu yang tidak dibayar oleh karena itu harus dicatat sebagai sumber daya terpisah daripada diubah menjadi ekspresi antusiasme yang diasumsikan. Biayanya mungkin berbeda di setiap rumah tangga. Pertanyaan untuk studi lebih lanjut adalah bagaimana kontribusi diminta, dipahami, dan didistribusikan, termasuk pengalaman orang yang tidak berkontribusi.

3.3 Layanan Komunitas dan pertukaran materi

Akun kandidat menyajikan pencarian jabatan melalui layanan dan dorongan penghuni rumah. Ini adalah klaim legitimasi yang bermakna secara lokal, tetapi catatan tidak mengungkapkan bagaimana pemilih menilainya. Penelitian tentang perantara pemilu mengidentifikasi motivasi yang beragam di antara perantara kampanye, bukan satu logika material tunggal (Aspinall, 2014). Studi pembelian suara mengkaji pertukaran yang ditargetkan dan strategi kandidat (Aspinall et al., 2017). Dengan latar belakang

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume X Edisi X, Maret 2021 (1-11)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
Nomor DOI: https://doi.org/10.51454/9rfc4f97

tersebut, pengeluaran banner tidak dapat diperlakukan sebagai pembelian suara, dan kontribusi terhadap biaya pemilihan tidak dapat otomatis diklasifikasikan sebagai patronase. Menetapkan salah satu akan membutuhkan bukti penerima, kondisi, pertukaran yang dimaksudkan, dan hubungan dengan pilihan pemilih.

Pengekangan yang sama berlaku untuk solidaritas. Catatan Bowen (1986) menunjukkan bahwa bantuan timbal balik terkait dengan harapan politik, sementara penelitian selanjutnya tentang gotong royong dan kewarganegaraan sosial menelaah makna institusional historisnya (Suwignyo, 2019). Penelitian tentang solidaritas pasca-bencana di Lombok lebih lanjut menunjukkan bahwa bantuan kolektif berada dalam keadaan sosial tertentu (Koopman, 2021). Studi-studi ini menjadikan gotong royong sebagai konsep sensitisasi yang berguna, bukan temuan yang didefinisikan oleh peserta: catatan Padaleu tidak menggunakan istilah tersebut. Berbagi makanan mungkin mendukung peristiwa ini, tetapi catatan tidak dapat mengidentifikasi apakah peserta mengalaminya sebagai kemurahan hati, timbal balik, kewajiban adat, atau campuran makna tersebut.
Catatan pendanaan yang lebih jelas akan membantu memisahkan dukungan komunitas dari ketergantungan administratif pada kandidat tertentu. Catatan dasar dapat membedakan penyediaan publik, donasi kandidat, donasi penduduk, dan kontribusi dalam bentuk barang, dengan harapan pelaporan yang sama diterapkan di antara kontributor. Ini adalah pengamanan yang diusulkan, bukan kekurangan yang diamati yang terbukti mengubah hasil. Penelitian tentang ambivalensi koproduksi menyoroti kesulitan menggabungkan peran publik dan sukarela (Frederiksen & Grubb, 2023). Temuan tentang ambiguitas komunikasi dan peran relawan juga menunjukkan alasan untuk menentukan tanggung jawab (Jensen & Thomsen, 2023). Relevansinya terletak pada memperjelas pertanyaan untuk manajemen pemilihan, bukan pada asumsi bahwa intervensi sektor jasa akan memiliki efek yang sama di sini.

3.4 Jaringan komunikasi dan akses informasi

Kombinasi pengumuman masjid dan grup WhatsApp menunjukkan bahwa komunikasi organisasi menggunakan hubungan yang sudah ada, bukan satu saluran pemilihan khusus. Hal ini mungkin memungkinkan pesan bergerak melalui pengaturan yang sudah dikenal, tetapi catatan tersebut tidak memberikan ukuran jangkauan atau pemahaman. Penelitian tentang pengalaman perempuan Indonesia dalam komunikasi WhatsApp terkait pemilu menunjukkan bahwa konteks kelompok membentuk pertemuan dengan konten politik (Wendratama et al., 2023). Studi tersebut tidak membuktikan misinformasi dalam Padaleu. Hal ini menegaskan mengapa ketersediaan platform dan kualitas informasi adalah isu terpisah yang memerlukan pemeriksaan langsung.

Implikasi praktisnya adalah menjaga pemberitahuan publik yang konsisten mengenai jadwal nominasi, persyaratan kelayakan, daftar kandidat, dan kontak keluhan, serta mengulanginya melalui saluran digital dan offline. Pemberitahuan semacam itu dapat melengkapi kelompok yang sudah digunakan. Aksesibilitasnya masih perlu dinilai melalui akun dan pengamatan penghuni. Pekerjaan partisipasi warga dalam solusi berbasis alam juga mengarahkan perhatian pada desain peluang partisipatif (Kiss et al., 2022). Transfer terbatas pada pertanyaan desain tersebut; baik penggunaan platform

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume X Edisi X, Maret 2021 (1-11)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
Nomor DOI: https://doi.org/10.51454/9rfc4f97

maupun keberagaman komunikasi bukanlah bukti yang cukup untuk partisipasi elektoral yang inklusif.

3.5 Dokumentasi dan perlindungan pilihan

Fotografi adalah pengamatan yang paling prosedural ambigu. Alasan yang direkam oleh komite bersifat bukti, tetapi mendokumentasikan suatu peristiwa dan mendokumentasikan pilihan individu adalah aktivitas yang berbeda. Penelitian tentang pemantauan smartphone telah memeriksa foto formulir hasil yang dipublikasikan sebagai cara untuk membandingkan total yang dilaporkan (Callen et al., 2016). Ini memberikan contoh dokumentasi yang berfokus pada catatan pemilihan publik. Ini tidak memvalidasi pengambilan gambar pemilih saat mereka menandai surat suara, dan catatan Padaleu terlalu tidak akurat untuk menentukan jenis informasi apa yang terkandung dalam gambar tersebut.

Penelitian tentang keyakinan tentang kerahasiaan surat suara menunjukkan bahwa persepsi pemilih tidak dapat disimpulkan dari keberadaan perlindungan formal (Dowling et al., 2019). Analisis privasi yang lebih baru dalam hasil pemilihan juga mempertimbangkan bagaimana transparansi dan kerahasiaan dapat berinteraksi (Kuriwaki et al., 2025). Studi-studi ini berkaitan dengan sistem pemilihan yang berbeda, sehingga temuan empirisnya tidak dapat diimpor sebagai hasil lokal. Studi-studi ini mendukung prinsip desain terbatas: dokumentasi harus membuat prosedur dapat ditinjau sambil melindungi pilihan individu. Catatan yang sesuai dapat mencakup tata letak pemungutan suara kosong, inventaris bahan, dan formulir hitungan agregat yang ditandatangani, sesuai dengan aturan lokal yang berlaku.

Bagi Padaleu, penilaian lebih lanjut perlu menentukan apa yang difoto, apakah pilihan terlihat, apa yang dipahami penduduk, dan siapa yang mengendalikan akses ke berkas. Kehadiran saksi yang tidak dibayar menimbulkan pertanyaan terkait tentang pelatihan dan tanggung jawab. Menyaksikan dapat menciptakan kesempatan untuk pengawasan, tetapi efektivitasnya bergantung pada apa yang dapat diamati dan direkam oleh saksi. Bukti dari studi pemantauan publik di Indonesia menunjukkan bahwa intervensi akuntabilitas memerlukan evaluasi empiris, bukan asumsi semata-mata tentang partisipasi (Olken, 2007, 2010). Kasus ini tidak memuat intervensi pemantauan maupun bukti hasil sehingga tidak dapat menilai apakah fotografi atau penyaksian meningkatkan integritas.

3.6 Keterbatasan dan implikasi untuk penelitian lebih lanjut

Keterbatasan utama studi ini adalah kompresi bukti. Lima ringkasan berlabel peran dan satu bagian pengamatan singkat menjaga praktik terpilih tetapi tidak pertukaran berkelanjutan, pandangan yang berbeda, atau riwayat keputusan. Dataset ini tidak memiliki catatan penduduk yang independen dari kandidat, perspektif kandidat yang gagal, dan informasi tentang abstain atau keberatan. Dataset juga tidak memiliki tanggal, karakteristik demografis, jumlah suara, total keuangan, dan strategi pengambilan sampel yang terdokumentasi. Penghilangan ini mencegah kesimpulan tentang prevalensi,

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume X Edisi X, Maret 2021 (1-11)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
Nomor DOI: https://doi.org/10.51454/9rfc4f97

representativitas, jenuh, atau perubahan seiring waktu. Ini juga menghalangi penilaian yang terverifikasi tentang kepatuhan hukum atau keadilan pemilu secara menyeluruh.

Studi yang lebih lengkap dapat mengikuti pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan, dan penanganan sengketa di beberapa unit RT dan RW. Studi ini harus mengumpulkan catatan komite, pemberitahuan publik, buku besar kontribusi, dokumentasi hitungan anonim, dan wawancara dengan penyelenggara serta warga yang memiliki pengalaman partisipasi yang berbeda. Penelitian organisasi mandiri komunitas menunjukkan nilai mengikuti interaksi dengan institusi pemerintah dari waktu ke waktu (Edelenbos et al., 2018). Desain semacam ini dapat menyelidiki apakah dukungan administratif mengurangi biaya partisipasi, apakah harapan kontribusi menghambat pencalonan, dan bagaimana penduduk memahami aklamasi. Catatan ini mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan ini tetapi tidak menjawabnya.

Kontribusi artikel ini karenanya sederhana namun spesifik. Artikel ini memperlihatkan pekerjaan organisasi yang menghubungkan pengaturan administratif dengan sumber daya komunitas sehari-hari. Artikel ini juga mengidentifikasi tiga hal yang harus dinilai secara terpisah: mobilisasi sumber daya, akses ke pengambilan keputusan, dan perlindungan pilihan elektoral. Memperlakukannya sebagai pertanyaan empiris terpisah menghindari meromantisasi kerja sama lokal sekaligus menganggap pengaturan informal secara inheren tidak demokratis. Bagi praktisi, nilai langsungnya adalah agenda terfokus untuk dokumentasi dan klarifikasi prosedural. Apakah perubahan ini meningkatkan kepercayaan, inklusi, atau akuntabilitas tetap menjadi pertanyaan empiris untuk penelitian selanjutnya.

4. Kesimpulan

Catatan lapangan Padaleu menggambarkan organisasi pemilihan RT/RW melalui pembentukan komite deliberatif, koordinasi kelurahan, jaringan komunikasi yang sudah terbentuk, jangkauan kandidat, kontribusi kolektif, saksi yang tidak dibayar, dan dokumentasi dengan smartphone. Catatan ini mencakup satu biaya banner yang dilaporkan kandidat sebesar IDR 600.000. Pengamatan ini mendukung penjelasan eksploratif tentang bagaimana pekerjaan pemilihan lingkungan diorganisasi. Pengamatan ini tidak menetapkan tingkat partisipasi, kesetaraan finansial, netralitas komite, kerahasiaan pemungutan suara, atau legitimasi hasil pemilihan.

Analisis ini membedakan kontribusi penduduk terhadap pelaksanaan dari otoritas mereka dalam keputusan pemilihan. Sumber daya kolektif dapat menopang suatu peristiwa sambil meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab tentang siapa yang menerima informasi, siapa yang menanggung biaya, dan siapa yang dapat menentang prosedur. Catatan kontribusi yang transparan, pemberitahuan publik yang konsisten, tanggung jawab pengamat yang jelas, dan dokumentasi yang melindungi pilihan pemilih menyediakan agenda praktis untuk pemeriksaan. Pekerjaan lapangan yang lebih lengkap diperlukan sebelum pengaturan ini dapat dievaluasi sebagai perlindungan inklusif atau efektif. Oleh karena itu, kasus ini menawarkan titik awal untuk mempelajari tata kelola pemilu sehari-hari dengan klaim yang proporsional terhadap bukti yang tersedia

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume X Edisi X, Maret 2021 (1-11)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
Nomor DOI: https://doi.org/10.51454/9rfc4f97

Daftar Pustaka

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners, 35*(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Aspinall, E. (2014). When brokers betray: Clientelism, social networks, and electoral politics in Indonesia. *Critical Asian Studies, 46*(4), 545–570. https://doi.org/10.1080/14672715.2014.960706

Aspinall, E., Berenschot, W., Savirani, A., & Ruhyanto, A. (2025). Analysing and explaining variation in village governance regimes across Indonesia. *South East Asia Research, 33*(1), 12–31. https://doi.org/10.1080/0967828x.2025.2483168

Aspinall, E., Rohman, N., Hamdi, A. Z., Rubaidi, & Triantini, Z. E. (2017). Vote buying in Indonesia: Candidate strategies, market logic and effectiveness. *Journal of East Asian Studies, 17*(1), 1–27. https://doi.org/10.1017/jea.2016.31

Bovaird, T. (2007). Beyond engagement and participation: User and community coproduction of public services. *Public Administration Review, 67*(5), 846–860. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00773.x

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal, 9*(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/qrj0902027

Bowen, J. R. (1986). On the political construction of tradition: Gotong royong in Indonesia. *The Journal of Asian Studies, 45*(3), 545–561. https://doi.org/10.2307/2056530

Brandsen, T., & Honingh, M. (2016). Distinguishing different types of coproduction: A conceptual analysis based on the classical definitions. *Public Administration Review, 76*(3), 427–435. https://doi.org/10.1111/puar.12465

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Braun, V., & Clarke, V. (2023). Toward good practice in thematic analysis: Avoiding common problems and be(com)ing a knowing researcher. *International Journal of Transgender Health, 24*(1), 1–6. https://doi.org/10.1080/26895269.2022.2129597

Byrne, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke's approach to reflexive thematic analysis. *Quality & Quantity, 56*(3), 1391–1412. https://doi.org/10.1007/s11135-021-01182-y

Callen, M., Gibson, C. C., Jung, D. F., & Long, J. D. (2016). Improving electoral integrity with information and communications technology. *Journal of Experimental Political Science, 3*(1), 4–17. https://doi.org/10.1017/xps.2015.14

Dowling, C. M., Doherty, D., Hill, S. J., Gerber, A. S., & Huber, G. A. (2019). The voting experience and beliefs about ballot secrecy. *PLOS ONE, 14*(1), Article e0209765. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0209765

Edelenbos, J., van Meerkerk, I., & Schenk, T. (2018). The evolution of community self-

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume X Edisi X, Maret 2021 (1-11)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
Nomor DOI: https://doi.org/10.51454/9rfc4f97

organization in interaction with government institutions: Cross-case insights from three countries. *The American Review of Public Administration, 48*(1), 52–66. https://doi.org/10.1177/0275074016651142

Evans, S. D., & Fernandez-Burgos, M. (2023). From empowerment to community power in participatory budgeting. *American Behavioral Scientist, 67*(4), 578–592. https://doi.org/10.1177/00027642221086947

Fajri, M. N., & Pradoto, W. (2023). Community self-organisation in neighbourhood parks in Perumnas Mojosongo, Surakarta. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 19*(2), 264–281. https://doi.org/10.14710/pwk.v19i2.51643

Frederiksen, M., & Grubb, A. (2023). The politics of insufficiency: Ambivalence and boundary work in the co-production of welfare services. *Public Management Review, 25*(3), 501–521. https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1978759

Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance. *Public Administration Review, 66*(Suppl. 1), 66–75. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00667.x

Helmke, G., & Levitsky, S. (2004). Informal institutions and comparative politics: A research agenda. *Perspectives on Politics, 2*(4), 725–740. https://doi.org/10.1017/s1537592704040472

Hicken, A. (2011). Clientelism. *Annual Review of Political Science, 14*(1), 289–310. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.031908.220508

Jakobsen, M. (2013). Can government initiatives increase citizen coproduction? Results of a randomized field experiment. *Journal of Public Administration Research and Theory, 23*(1), 27–54. https://doi.org/10.1093/jopart/mus036

Jakobsen, M., & Andersen, S. C. (2013). Coproduction and equity in public service delivery. *Public Administration Review, 73*(5), 704–713. https://doi.org/10.1111/puar.12094

Jensen, U. T., & Thomsen, M. K. (2023). Can managerial communication reduce ambiguity among service professionals about volunteer roles in coproduction? An experimental test. *The American Review of Public Administration* Advance online publication. https://doi.org/10.1177/02750740231191286

Kiss, B., Sekulova, F., Hörschelmann, K., Salk, C. F., Takahashi, W., & Wamsler, C. (2022). Citizen participation in the governance of nature-based solutions. *Environmental Policy and Governance, 32*(3), 247–272. https://doi.org/10.1002/eet.1987

Koopman, J. (2021). The restoration of gotong royong as a form of post-disaster solidarity in Lombok, Indonesia. *South East Asia Research, 29*(3), 279–296. https://doi.org/10.1080/0967828x.2021.1966318

Kuriwaki, S., Lewis, J. B., & Morse, M. (2025). Privacy violations in election results. *Science Advances, 11*(11), Article eadt1512. https://doi.org/10.1126/sciadv.adt1512

Malterud, K., Siersma, V. D., & Guassora, A. D. (2016). Sample size in qualitative interview studies: Guided by information power. *Qualitative Health Research, 26*(13), 1753–

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume X Edisi X, Maret 2021 (1-11)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
Nomor DOI: https://doi.org/10.51454/9rfc4f97

1760. https://doi.org/10.1177/1049732315617444

Nabatchi, T., Sancino, A., & Sicilia, M. (2017). Varieties of participation in public services: The who, when, and what of coproduction. *Public Administration Review, 77*(5), 766–776. https://doi.org/10.1111/puar.12765

O'Brien, B. C., Harris, I. B., Beckman, T. J., Reed, D. A., & Cook, D. A. (2014). Standards for reporting qualitative research: A synthesis of recommendations. *Academic Medicine, 89*(9), 1245–1251. https://doi.org/10.1097/acm.0000000000000388

Olken, B. A. (2007). Monitoring corruption: Evidence from a field experiment in Indonesia. *Journal of Political Economy, 115*(2), 200–249. https://doi.org/10.1086/517935

Olken, B. A. (2010). Direct democracy and local public goods: Evidence from a field experiment in Indonesia. *American Political Science Review, 104*(2), 243–267. https://doi.org/10.1017/s0003055410000079

Orbawati, E. B., Fadlurrahman, Mukti, A., & Nugraha, J. T. (2026). The neighborhood association model as a mechanism for participatory governance and economic empowerment in urban communities. *Changing Societies & Personalities, 10*(3), 628–648. https://doi.org/10.15826/csp.2026.10.3.403

Ostrom, E. (1996). Crossing the great divide: Coproduction, synergy, and development. *World Development, 24*(6), 1073–1087. https://doi.org/10.1016/0305-750x(96)00023-x

Sidik, F., & Habibi, M. (2024). A prize for the village ruling class: "Village Funds" and class dynamics in rural Indonesia. *Journal of Contemporary Asia, 54*(3), 387–411. https://doi.org/10.1080/00472336.2023.2193968

Small, M. L. (2009). "How many cases do I need?" On science and the logic of case selection in field-based research. *Ethnography, 10*(1), 5–38. https://doi.org/10.1177/1466138108099586

Steiner, A., Farmer, J., Yates, S., Moran, M., & Carlisle, K. (2023). How to systematically analyze co-production to inform future policies? Introducing 5Ws of co-production. *Public Administration Review, 83*(3), 503–521. https://doi.org/10.1111/puar.13571

Suwignyo, A. (2019). Gotong royong as social citizenship in Indonesia, 1940s to 1990s. *Journal of Southeast Asian Studies, 50*(3), 387–408. https://doi.org/10.1017/s0022463419000407

Syukri, M. (2024). Neglecting the poor and marginalized: Participatory village governance in Indonesia's New Developmentalist state. *Development Policy Review, 42*(4), Article e12776. https://doi.org/10.1111/dpr.12776

Tong, A., Sainsbury, P., & Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): A 32-item checklist for interviews and focus groups. *International Journal for Quality in Health Care, 19*(6), 349–357.